

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahab, Solichin, 2010, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2010, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arifin, N. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Kasus*, Universitas Islam Nusantara, Jepara.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendrerel & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dede Rosyada, Dkk, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Grindle, Merilee S. 2017, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2009, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta.
- Parsons, Wayne, 2006, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pramono U. Tanthowi, dkk., 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Sirajuddin, dkk., 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, UNY Press, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Yuningsih, Tri, 2019, *Kajian Birokrasi*, Departemen Administrasi Publik Press, Semarang.

## **JURNAL**

- Ahmad Alfarabi, Arizka Warganegara, Tabah Maryanah, Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, *Mediova: Journal Of Islamic Media Studies*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.
- Akib, Haedar, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Ana Sabhana Azmi, Hammardan Gazalba Harahap, Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019, *INDEPENDEN Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.

- Asep Hidayat, Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Indra Madan Putra, Ria Ariany, Syahrizal, Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, *Jispo*, Vol 9 No. 1 Tahun 2019.
- Iriyadi, et al. Blockchain Utilization In Actions To Empower Digitalization Of Accounting Information Systems For Small And Medium-Sized Entities In Indonesia, *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol. 101 No. 17 Tahun 2023.
- Jumria, Mansur, Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021.
- Mustafa, Reizki Maharani, Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, *Jurnal Sosial Politik*, Vol.6 No. 1 Tahun 2022.
- Sutmasa, Yosep Gede, Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik, *Jurnal Cakrawati*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- V.V., Goryunova, T.I., Goryunova, Y.V., Molodtsova, Integration and Security of Corporate Information Systems in the Context of Industrial Digitalization, *2020 2nd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA)*, IEEE, 2020.
- Wisnu Nugraha, Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2023.

### **SKRIPSI DAN TESIS**

- Putri, A. A. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung*.

Sultan, W. F. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, *Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*.

Zahwan, F. A. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta*.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## WEBSITE

<https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>, *“Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024”* diakses pada tanggal 13 januari 2024.

<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/index.php/berita/Pendaftaran-Verifikasi-dan-Penetapan-Partai-Politik-Peserta-Pemilu-2024>, *“Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024”* diakses pada tanggal 13 januari 2024.

<https://www.rri.co.id/index.php/pemilu/322511/kenali-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, *“Kenali 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024”* diakses pada tanggal 13 januari 2024.

<https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJQmdwN-soal-penggunaan-video-call-saat-verifikasi-administrasi-ini-penjelasan-kpu>, *Soal Penggunaan Video Call Saat Verifikasi Administrasi, Ini Penjelasan KPU* diakses pada tanggal 12 januari 2024.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/09/penggunaan-panggilan-video-dalam-verifikasi-administrasi-tidak-sesuai-prosedur>, *“Bawaslu: Panggilan Video dalam Verifikasi Administrasi Tak Sesuai Prosedur”* diakses pada tanggal 12 januari 2024.